

UMKM Paham Pajak: Program Pendampingan Perpajakan UMKM Kemenkeu Satu

Hanik Susilawati Muamarah¹, Sulfan², Dhian Adhetya Safitra³, Febrina⁴

Kata Kunci:

kewajiban perpajakan;
modul;
pendampingan;
UMKM

Keywords :

tax obligations;
modules;
assistance;
MSMEs

Correspondensi Author

¹Akuntansi Sektor Publik
Politeknik Keuangan Negara STAN
Alamat: Jl. Bintaro Utama Sektor V,
Pondok Aren, Tangerang Selatan
Email: hanik.muamarah@pknstan.ac.id

History Article

Received: 22-03-2023;
Reviewed: 22-06-2023;
Accepted: 10-07-2023;
Available Online: 20-08-2023;
Published: 28-08-2023

Abstrak. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan agar UMKM mampu melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu membayar dan memahami cara pelaporan SPT Tahunan menggunakan e-filing. Pengabdian dilakukan berupa penyediaan modul, bimbingan teknis secara daring, serta pendampingan secara luring kepada para UMKM. Dari hasil pengabdian, telah berhasil disusun modul yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, serta UMKM mampu memahami informasi mengenai perpajakan yang disampaikan, serta dapat melakukan pembayaran pajaknya sendiri melalui djponline. Program ini dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan literasi perpajakan UMKM serta membantu mengubah persepsi bahwa kewajiban pajak dapat dilaksanakan dengan mudah. Pendampingan lebih efektif dilaksanakan secara luring, agar kendala dapat diselesaikan langsung.

Abstract. This community service program aims to make MSMEs able to carry out their tax obligations, namely paying and understanding how to report Annual SPT using e-filing. The service is carried out in the form of providing modules, online technical guidance, and offline assistance to MSMEs. From the results of the service, modules have been successfully developed that suit the needs of MSMEs, and MSMEs are able to understand information regarding tax return and can make their own tax payments via djponline. This program can be a way to increase MSME tax literacy and help change the perception that tax obligations can be carried out easily. Assistance is more effectively carried out offline, so that problems can be resolved directly



PENDAHULUAN

Pemberdayaan UMKM saat ini merupakan salah satu hal yang diprioritaskan oleh Pemerintah. Hal ini tidak lepas dari peran besar UMKM dalam perekonomian Indonesia, yang ditunjukkan dengan peningkatan produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Peningkatan PDB terjadi seiring dengan peningkatan jumlah UMKM. Namun sayangnya, peningkatan jumlah UMKM bukan berarti bahwa UMKM yang ada, seluruhnya telah berkembang dengan baik. Banyak permasalahan yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan akses pembiayaan usaha, terutama dari pihak perbankan (Syamsulbahri, 2018), serta pemasaran dan *product development quality* (Septiana, Rozi, & Muar, 2019).

Salah satu penyebab sulitnya akses pembiayaan usaha ialah karena laporan keuangan yang kurang berkualitas. Pihak pemberi dana (kreditur) masih melihat laporan keuangan sebagai salah satu dokumen yang dapat menunjukkan kondisi usaha calon debitur, proyeksi masa depan, yang sekaligus memberikan gambaran kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sampai masa pinjaman berakhir. Murti, Trisnadewi, Citraresmi, & Saputra (2018) menyebutkan bahwa semakin berkualitas laporan keuangan, jumlah kredit yang dapat diperoleh juga semakin besar.

Indikator lain perkembangan UMKM ialah luasnya jangkauan pemasaran. Jangkauan pemasaran juga akan memberikan potensi peningkatan omzet bagi pemilik UMKM. UMKM sebenarnya memiliki peluang untuk memperluas jalur pemasaran melalui ekspor maupun sebagai penyedia barang dan jasa dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, banyak UMKM yang belum mengetahui ketentuan atau persyaratan mengenai hal tersebut. (Iqbal, 2020). Hal ini pada akhirnya membatasi akses UMKM untuk memasuki pasar ekspor atau pengadaan pemerintah melalui e-katalog.

Dalam perolehan kredit perbankan, keikutsertaan dalam e-katalog maupun sistem informasi pengadaan pemerintah lainnya, salah satu hal yang menjadi perhatian ialah

pelaksanaan kewajiban perpajakan. Salah satu syarat yang umum diberlakukan ialah adanya kewajiban bagi UMKM untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Meskipun sebagian besar UMKM telah ber-NPWP, banyak UMKM yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, antara lain pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Tidak dilaksanakannya kewajiban perpajakan ini, menunjukkan tingkat literasi mengenai pajak yang masih rendah, seperti yang terjadi di Sumatera Utara (Muamarah et al., 2021).

Permasalahan-permasalahan tersebut juga banyak dialami oleh UMKM di Sumatera Selatan. Berdasarkan pengamatan dan observasi awal, para UMKM kurang memahami adanya kewajiban perpajakan. Kendala yang dihadapi ialah ketidakpahaman mengenai cara perhitungan pajak, cara pembayaran, serta pelaporan SPT. Rendahnya literasi perpajakan ini antara lain disebabkan anggapan UMKM bahwa hal tersebut tidak memberikan nilai tambah terkait daya saingnya (Resmi, Pahlevi, & Sayekti, 2019). Padahal rendahnya pemahaman mengenai prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan ini juga mengakibatkan adanya anggapan bahwa ketentuan perpajakan sangat sulit dan rumit (Utami, Umam, & Djuhartono, 2021).

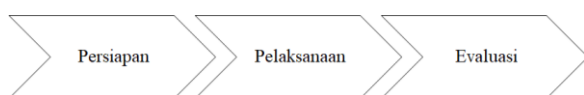
Melihat kondisi ini, dibutuhkan adanya suatu program pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman dan pendampingan bagi UMKM untuk dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas, melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta memahami peraturan serta ketentuan yang berlaku dalam rangka memasuki pasar ekspor dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Program ini dilakukan dalam bentuk pendidikan kepada masyarakat. (Riduwan, 2016) menyebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan merupakan upaya perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membekali UMKM agar dapat menyusun

laporan keuangan, melaksanakan kewajiban perpajakan, serta memperluas jangkauan pemasaran. Khusus untuk tim perpajakan, pendampingan yang dilakukan bertujuan agar UMKM dapat memahami kewajiban perpajakannya serta dapat menghitung serta mengisi SPT Tahunan PPh menggunakan e-Filing. Kegiatan pendampingan dilakukan sebagai rangkaian program UFine, Kemenkeu Satu dan program Beli Kreatif Sumatera Selatan (BKSS), kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

METODE

Kegiatan berupa pendampingan pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam pengabdian kepada masyarakat dilakukan sebagai berikut.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Hal-hal yang dilakukan dalam masa persiapan antara lain pemilihan UMKM yang akan dipilih menjadi peserta pendampingan, serta pemetaan awal permasalahan yang dihadapi UMKM terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pemilihan UMKM dilakukan bekerja sama dengan Kemenparekraf serta Kantor Perwakilan Kemenkeu Satu di Sumatera Selatan. Kriteria UMKM yang dipilih antara lain telah memiliki produk dan *brand* yang potensial untuk dikembangkan pemasarannya serta telah memiliki NPWP.

Tahap pelaksanaan dilakukan dalam tiga kegiatan, yaitu penyusunan modul, bimbingan teknis (bimtek) secara daring, serta pendampingan secara luring. Penyusunan materi untuk modul dan bimtek disesuaikan dengan kebutuhan peserta berdasarkan hasil pemetaan permasalahan. Dalam penyusunan modul, tim pengabdian melibatkan mahasiswa untuk tata letak modul.

Tahap evaluasi dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas hasil bimbingan teknis dan pendampingan yang dilaksanakan. Pemantauan dilakukan untuk melihat apakah UMKM telah berhasil melakukan pembayaran atau pelaporan SPT Tahunan

Pajak penghasilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap persiapan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui diskusi dengan mitra, dalam hal ini Kemenparekraf untuk mengetahui hal-hal yang dibutuhkan dalam pendampingan. Kemenparekraf merupakan pemilik program BKSS, suatu program pemberdayaan UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah pelaku ekraf Sumatera Selatan melalui penguatan *branding*, *trust* dan pemasaran secara *online* maupun *offline*, peningkatan omzet, serta penyerapan dan perluasan akses ekspor.

Berdasarkan hasil diskusi, diketahui kebutuhan dari UMKM peserta BKSS ialah pengetahuan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hak dan kewajiban setelah ber-NPWP, pembayaran pajak, serta pelaporan SPT Tahunan menggunakan DJPonline. Selain itu, karena nantinya UMKM juga akan disiapkan untuk siap ekspor, materi perpajakan juga diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai kewajiban pajak bagi UMKM apabila mereka akan memperluas pasar ke luar negeri. Diskusi juga melibatkan penyuluh pajak di Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, terdapat 200 UMKM yang akan mengikuti pendampingan secara daring dan 32 UMKM yang mengikuti pendampingan secara luring di Palembang. Pembatasan jumlah peserta secara luring dilakukan karena pendampingan masih dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 dan demi efektivitas pelaksanaan pendampingan.



Gambar 2. Diskusi Tahap Persiapan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan cukup banyak, yaitu penyusunan modul, pelaksanaan bimtek daring, serta pendampingan secara luring. Penyusunan

dilakukan penyampaian materi serta pendampingan langsung mengenai penggunaan akun djponline serta menunjukkan simulasi pengisian SPT Tahunan PPh Formulir 1770.



Gambar 4. Penyampaian Materi dalam Bimtek Luring

Pelaporan SPT Tahunan PPh melalui *e-filing* dilakukan menggunakan akun djponline. Penggunaan akun djponline mensyaratkan NPWP berstatus aktif serta wajib pajak mengetahui e-FIN yang digunakan sebagai identifikasi akun. Untuk mempermudah pelaksanaan saat bimtek, sebelum pelaksanaan bimbingan teknis, tim pengabdian kepada masyarakat melakukan pendataan mengenai pemilikan NPWP, nomor NPWP untuk memastikan status NPWP aktif atau tidak, serta apakah WP mengetahui e-FIN-nya atau tidak. Untuk NPWP dengan status Non Efektif (NE), serta nomor e-FIN yang tidak dapat diingat oleh Wajib Pajak, Tim bekerja sama dengan Penyuluh Pajak di Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung untuk memfasilitasi penyediaan e-FIN tersebut.

Saat pendampingan luring, beberapa kendala yang dihadapi ialah UMKM yang tidak membawa laptop, sehingga kesulitan untuk melakukan pengisian, data omzet yang tidak lengkap, serta kendala lupa e-FIN tidak diinformasikan sebelumnya. Beberapa permasalahan dapat diselesaikan saat pendampingan, tetapi karena keterbatasan waktu, tidak semua dapat diselesaikan. Oleh karena itu, setelah pendampingan luring, tim pengabdian juga membuka kesempatan bagi UMKM untuk berkonsultasi apabila masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Konsultasi dapat dilakukan melalui chat dengan aplikasi percakapan.

Evaluasi kegiatan dilaksanakan

dengan menanyakan kepada peserta mengenai pemahaman saat penyampaian materi dalam bimtek daring dan pendampingan luring. Evaluasi pada bimtek daring dilaksanakan melalui penyampaian kuesioner sedangkan pada bimtek luring dilakukan dengan menanyakan secara langsung kepada UMKM serta melihat progress yang dialami selama proses pendampingan.

Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh peserta bimtek daring, seluruh peserta menyatakan bahwa materi yang disampaikan bermanfaat, tetapi menyarankan agar dapat dilakukan pendampingan langsung secara luring. Pendampingan secara intensif, satu persatu secara khusus diyakini dapat meningkatkan *engagement* serta perilaku belajar, seperti halnya dalam pembelajaran formal di kelas (Yusuf, Onifade, & Bello, 2016). Hal ini juga terbukti dalam proses pendampingan, ketika tim pengabdian memperhatikan secara khusus UMKM peserta pendampingan, mereka lebih terbuka dan mau mengikuti dengan baik, sehingga masalah yang dihadapi juga dapat diselesaikan dengan baik. Saat pelaksanaan pendampingan secara luring, peserta menyampaikan testimoni bahwa kegiatan yang dilaksanakan membantu peserta untuk memahami kewajiban perpajakannya lebih baik. Peserta yang semula tidak dapat mengakses akun djponline juga pada akhirnya dapat mengakses akun setelah dibimbing untuk melaksanakan tahapannya satu persatu. Meskipun tidak seluruh peserta dapat mengisi SPT Tahunan PPh *on the spot* karena kendala tidak lengkapnya catatan peredaran usaha yang, seluruh peserta secara umum telah mengetahui tahapan yang harus dilaksanakan.

Upaya memahamkan kewajiban perpajakan ini dilaksanakan oleh tim pengabdian sebagai bagian dari Kemenkeu Satu, sebagai bentuk dukungan pada program penyuluhan pajak yang dilakukan oleh DJP. Saat ini, masih terdapat stigma negatif pajak yang dirasakan masyarakat sehingga membawa dampak keengganan masyarakat datang ke kantor pajak dan lebih jauh lagi dapat mengarah pada tindakan *tax evasion* (Handayani, 2014). Oleh karena itu, tim pengabdian mencoba mengisi ruang ini, dengan harapan penyuluhan dari pihak akademisi dapat diterima dengan lebih baik oleh

UMKM. Melalui program ini, diharapkan dapat sedikit memberikan persepsi bahwa urusan pajak sebenarnya tidak rumit.

SIMPULAN DAN SARAN

Pemahaman mengenai kewajiban pajak merupakan suatu hal yang seharusnya dimiliki oleh seluruh UMKM. Untuk mewujudkannya, program pendampingan yang dilakukan kepada UMKM dalam program BKSS dan UFine Kemenkeu Satu dilaksanakan dalam beberapa bentuk yaitu penyusunan modul, pelaksanaan bimbingan teknis secara daring dan luring. Dari program pendampingan dapat dihasilkan modul yang sesuai dengan kebutuhan UMKM berdasarkan pemetaan awal, UMKM mampu memahami materi yang diberikan saat bimtek, serta UMKM berhasil melakukan pembayaran pajaknya sendiri melalui djponline. Belum seluruh wajib pajak selesai melaporkan SPT Tahunan Formulir 1770 karena adanya data yang belum disiapkan oleh UMKM.

Untuk program pengabdian kepada masyarakat selanjutnya, diperlukan partisipasi aktif UMKM dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan agar pada akhir proses pendampingan, mereka telah dapat melaporkan SPT Tahunan PPh. UMKM juga perlu menyadari bahwa kewajiban ini merupakan hal rutin yang akan mereka lakukan setiap tahun. Untuk menyiasati kendala UMKM yang tidak membawa laptop, ke depannya dapat diupayakan penyediaan satu atau beberapa laptop/PC dalam proses pendampingan luring.

DAFTAR RUJUKAN

- Handayani, B. D. (2014). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, KEADILAN, TEKNOLOGI PERPAJAKAN, DAN KETIDAKPERCAYAAN KEPADA PIHAK FISKUS TERHADAP TINDAKAN TAX EVASION. *Accounting Analysis Journal*, 3(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4216>
- Inderawati, M. M. W., Sulistyaningsih, E., Aldi, B. E., Pratikto, A., Efendi, Kusumahadi, T. A., ... Silalahi, E. E. (2021). PENYUSUNAN MODUL RENCANA KEBERLANGSUNGAN BISNIS BAGI UMKM INDONESIA UNTUK MERESPON DAMPAK PANDEMI COVID-19. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JPKM*, 27(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jpkm.v27i3.24286>
- Iqbal, M. (2020). PENGARUH PELAKSANAAN E KATALOG DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP UMKM. *Jurnal USM Law Review*, 3(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204>
- Muamarah, H. S., Safitra, D. A., Nurhidayati, Khusnaini, Nugroho, R., & Liyana, N. F. (2021). PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBUKUAN DAN PERPAJAKAN UMKM. *JMM: Jurnal Masyarakat Mandiri*, 5(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v5i5.5271>
- Murti, A. K., Trisnadewi, A. A. E., Citraresmi, L. D., & Saputra, K. A. K. (2018). SAK ETAP, Kualitas Laporan Keuangan dan Jumlah Kredit yang diterima UMKM. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/ekuitas.v6i2.16300>
- Resmi, S., Pahlevi, R. W., & Sayekti, F. (2019). *Tingkat Keunggulan Bersaing yang Berkelanjutan pada UMKM Kreatif di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Antesedennya*.
- Riduwan, A. (2016). PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT OLEH PERGURUAN TINGGI. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(2), 95. Retrieved from https://web.archive.org/web/20170923011612id_/https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/viewFile/1886/1764
- Septiana, N. I., Rozi, A. F., & Muar, R. (2019). Analisis Masalah dan Solusi

- Prioritas Pengembangan UMKM. *JIHBIZ: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.33379/jihbiz.v3i1.785>
- Syamsulbahri, D. (2018). UMKM DALAM PERSPEKTIF PEMBIAYAAN INKLUSIF DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 26(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14203/JEP.26.1.2018.59-76>
- Utami, A. A., Umam, K., & Djuhartono, T. (2021). Penyuluhan Literasi Pajak Berbasis Komunikasi Publik di PT ZAF Internasional. *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 77–85.
- Yusuf, T. A., Onifade, C. A., & Bello, O. S. (2016). Impact of Class Size on Learning, Behavioral and General Attitudes of Students in Secondary Schools in Abeokuta, Ogun State Nigeria. *Journal of Research Initiatives*, 2(1). Retrieved from <https://digitalcommons.uncfsu.edu/jri/vol2/iss1/12>